

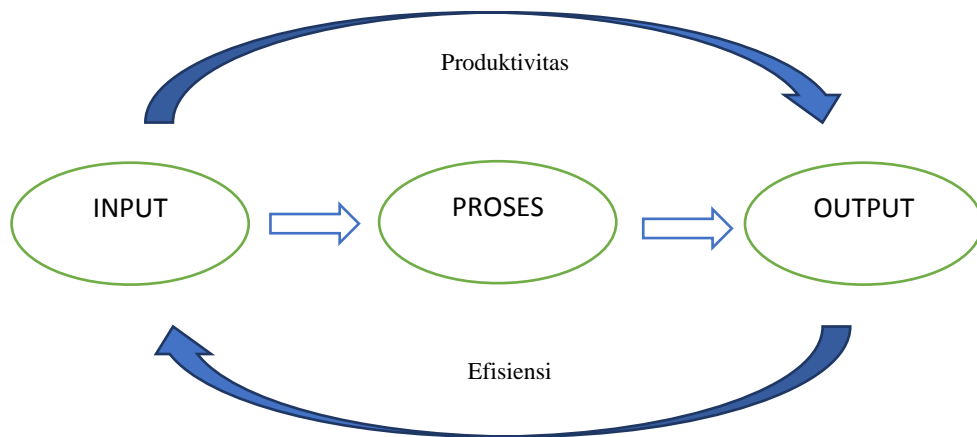
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efisiensi adalah tingkat perbandingan antara masukan (input) dengan hasil (output) yang dicerminkan dalam rasio atau perbandingan diantara keduanya. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dikatakan tidak efisien. Jadi tinggi rendahnya efisien ditentukan oleh besar kecilnya rasio yang dihasilkan. (Riki Satia Muharam, Administrasi Negara (Catatan Kuliah), 2005, hal 158).

Efisiensi merujuk pada suatu tingkatan tertentu pada saat penyediaan pelayanan dapat dimaksimalkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki (Lovell, 2002). Sebaliknya, efisiensi juga dapat menggambarkan suatu tingkatan pada saat penggunaan sumber daya dapat diminimalkan dalam rangka penyediaan pelayanan yang telah ditentukan. Efisiensi dapat menunjukkan sejauh mana suatu unit organisasi atau biasa disebut decision making unit (DMU), menggunakan sumber daya yang ada untuk memproduksi barang atau jasa (Kalb, 2010). DMU dapat berupa unit pabrik, departemen-departemen pada suatu organisasi seperti universitas, sekolah, bank, rumah sakit, pembangkit listrik, kantor polisi, kantor pajak, pertahanan dan keamanan, bahkan juga termasuk individu seperti praktisi kesehatan (Ramanathan, 2003).



Gambar 1.1

Informasi kinerja efisiensi sangat dibutuhkan baik oleh internal Pemerintah maupun stakeholdernya. Masyarakat sebagai stakeholder dan pengguna layanan dan barang publik, membutuhkan informasi efisiensi untuk menilai akuntabilitas dan pertanggungjawaban Pemerintah atas penggunaan sumber daya, seperti sumber daya alam, pajak, tenaga kerja dan sebagainya, dalam menyediakan layanan dan barang publik

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara di dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Budget in Brief APBN Tahun 2018 (APBN Tahun 2018), target penerimaan dari sektor perpajakan (pajak, bea dan cukai) sebesar Rp1.618,1 triliun atau 84,54% dari total APBN Tahun 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun. Target penerimaan perpajakan pada APBN Tahun 2018 naik sebesar sebesar Rp. 145,4 Triliun. Menurut Hutagaol (2007 74), agar sistem *self assessment* berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan 3 (tiga) fungsi, yaitu penyuluhan (*disseminations*), pelayanan (*service*) dan pengawasan (*law enforcement*). Di bidang pengawasan, terdapat 3 (tiga) pilar yaitu

pemeriksaan (*audit*), penyidikan (*investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Pemeriksaan pajak menurut Hutagaol (2007 64) adalah

“Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (*taxpayer’s compliance*) di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain (*other purpose*).”

Rudianto (20093) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Dengan adanya anggaran maka manajemen dapat membandingkan dan menganalisa biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan, yang dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan. Penyusunan anggaran sangatlah penting dalam pencapaian tujuan/rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah.

Dengan tingkat Efisiensi terhadap jumlah alokasi jumlah pegawai dan anggaran yang lebih baik maka diharapkan akan didapatkan penerimaan pajak yang lebih baik kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Efisiensi Jumlah Pegawai Pajak dan Anggaran Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II* ”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini didasari dari berbagai penelitian sebelumnya yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penelitian. Berdasarkan konseptual penelitian yang dikembangkan oleh Hendra Triantoro dan Bambang Subroto (2016) yang meneliti kinerja efisiensi di kantor pelayanan pajak pratama di Kanwil Jawa Timur III dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Pengukuran kinerja organisasi sektor publik, yang lebih khusus di dalam lingkungan pemerintahan acapkali di dasari dengan konsep *valuer for money*, dengan ukuran efisiensi sebagai elemen utama (mardiasmo, 2009131).

Penelitian ini untuk menguji anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang digunakan sebagai input apakah sudah mendapatkan hasil (output) yang paling maksimal. Dengan demikian dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian adalah, Bagaimana tingkat efisisiensi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jawa Tengah II selama waktu 2015-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi relative di Kantor pelayanan pajak pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk tahun 2015-2018.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. menambah wawasan keilmuan khususnya bidang manajemen serta penerapan metodologi penelitian kuantitatif dalam organisasi pemerintah;
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya serta lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap efisiensi penggunaan tenaga pegawai dan anggaran.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk mengetahui tingkat efisiensi jumlah pegawai terhadap target yang ditentukan di instansi pemerintah;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen penempatan pegawai yang sesuai dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui tingkat efisiensi jumlah anggaran DIPA terhadap target yang ditentukan di instansi pemerintah;
- d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen untuk menganggarkan DIPA pemerintahan yang sesuai dalam mencapai target yang telah ditetapkan;